



**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN
DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BUNGO**

Eryasi Daryati

Universitas Muara Bungo

(Naskah diterima: 1 Juni 2019, disetujui: 28 Juli 2019)

Abstract

The application of the SIMDA Financial application to the Bungo Regency Regional Financial and Asset Management Agency is based on SIMDA elements such as adequate internet network access, basic infrastructure and applications, all infrastructure in the form of Hardware, Software and Brainware is adequate as well as information management and processing organizations supporting organizations that are manage, provide and process information transactions and electronic documents that are sufficient so that the SIMDA Financial Application has produced financial statement information and other financial information with excellent quality relevance, excellent accuracy and very good timeliness as well.

Keywords: *Implementation, SIMDA Finance.*

Abstrak

Penerapan aplikasi SIMDA Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo berdasarkan unsur SIMDA seperti akses jaringan internet yang sudah cukup memadai, infrastruktur dan aplikasi dasar, semua prasarana baik berbentuk *Hardware, Software* maupun *Brainware* sudah memadai serta organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik yang memadai sehingga Aplikasi SIMDA Keuangan telah menghasilkan informasi laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dengan kualitas Relevansi yang sangat baik, Akurasi yang sangat baik dan ketepatan waktu yang sangat baik pula.

Kata Kunci : *Implementasi, SIMDA Keuangan.*

I. PENDAHULUAN

Laporan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada masyarakat maupun pemerintah pusat yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta pengelolaan keuangan

daerah. Undang-Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan landasan yuridis atas perkembangan otonomi daerah dimana pengelolaan keuangan oleh masing-masing pemerintah daerah wajib

untuk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas masing-masing daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah yang telah digunakan dalam satu tahun anggaran. Untuk mewujudkan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut juga harus didukung oleh sistem pengelolaan keuangan yang dapat diandalkan yaitu suatu sistem yang mampu mengolah data (input) dan menghasilkan informasi (output) yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan secara cepat, akurat dan relevan. Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang akuntabel Pemerintah Kabupaten Bungo juga telah menerapkan SIMDA Keuangan dalam pengelolaan data keuangan daerahnya. SIMDA telah disosialisasikan di Kabupaten Bungo sejak tahun 2009 namun belum diaplikasikan sepenuhnya dan baru diterapkan secara keseluruhan baik laporan maupun penatausahaannya pada tahun 2011. Dalam penerapannya SIMDA keuangan di Kabupaten Bungo berpusat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. SIMDA Keuangan sejak tahun 2019 sudah bisa online dimasing-

masing OPD, hal ini dikarenakan jaringan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bungo, sehingga untuk penginputan data bisa dilaksanakan di masing-masing OPD, meskipun masih menemukan beberapa kendala, misalnya jaringan kadangkala tidak terhubung di OPD pada saat itu, akan tetapi hal ini segera bisa diatasi.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah karena SIMDA Keuangan berpusat di BPKAD Kabupaten Bungo.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Organisasi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (UU. No. 33 Tahun 2004) Organisasi Pemerintahan.

Daerah terdiri dari Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah. Dalam Struktur Pemerintah Daerah, Satuan Kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan

atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja

2.2 Laporan Keuangan Akuntansi

Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari serangkaian proses sistem informasi akuntansi. Dalam sistem akuntansi pemerintah Daerah, laporan keuangan digunakan sebagai media pertanggungjawaban atas alokasi APBD yang telah digunakan selama tahun berjalan. Laporan keuangan dalam pemerintah daerah dibagi menjadi dua, yaitu laporan keuangan untuk entitas pelaporan dan laporan keuangan untuk entitas akuntansi. Berdasarkan PP 71 tahun 2010 dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2.3 Karakteristik Kualitatif Laporan

Keuangan

Kualitas informasi merupakan unsur terpenting dari proses penyampaian informasi. Informasi yang berkualitas akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pula. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki : Relevan, Andal, Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami

2.4 Pengertian SIMDA

Perubahan sistem pencatatan pemerintah daerah dari *single entry* ke *double entry* memerlukan sistem pencatatan dan sistem pembukuan yang lebih kompleks. Untuk mampu menangani jumlah transaksi ekonomis yang sangat banyak diperlukan suatu sistem yang mampu memudahkan bendahara ataupun pengelola keuangan dan anggaran daerah dalam melakukan penyusunan laporan keuangan daerah. SIMDA merupakan paket program aplikasi komputer yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Program aplikasi komputer SIMDA dapat membantu proses administrasi Pemerintah Daerah dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

SIMDA adalah salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat dan terpadu untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan.

2.5 Unsur SIMDA

Kerangka arsitektur SIMDA terdiri dari, yaitu :

- a. Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet dan media komunikasi lainya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik.
- b. Portal, pelayanan publik. Situs web pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik disejumlah instansi yang terkait.
- c. Organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.
- d. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk men-

dukung pengelolaan, pengolahan, transaksi dan penyaluran informasi.

Manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan aplikasi keuangan daerah terintegrasi adalah :

- a. Database terpadu, tidak perlu *input* berulang-ulang untuk data yang sama.
- b. Validasi data terjamin, data yang masuk akan tercek dan ricek secara otomatis.
- c. Dapat menghasilkan *output* yang rapi.

Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan.

III. METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) yang diterapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo sebagai Sistem Pengelolaan Dan Pelaporan Data Keuangan berbasis computer.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini mencoba menggambarkan tentang Sistem Pengolah Data Keuangan Pemerintah Daerah yang diterapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo melalui Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan).

Data Primer dapat berupa opini, wawancara serta observasi. Sumber data yang diperoleh dari metode wawancara adalah responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan yang diajukan baik secara tertulis ataupun lisan. Responden dalam penelitian ini adalah Admin/Operator SIMDA Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo, dan pengguna Laporan Keuangan. Sedangkan sumber data untuk metode observasi adalah aplikasi SIMDA Keuangan yang dijadikan objek pengamatan.

Data Sekunder adalah Sumber Data yang peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data berupa dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan penelitian seperti Laporan Keuangan, Prosedur Manual SIMDA Keuangan dan dokumen pendukung lainnya.

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan Admin/Operator SIMDA Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo, dan pengguna Laporan Keuangan.

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mendokumentasikan data-data yang berkaitan dengan penerapan SIMDA Keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan termasuk pengujiannya. Penelitian ini menganalisis penerapan SIMDA Keuangan sebagai aplikasi pengolah data keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo. Analisis data dalam penelitian ini mencakup :

- a. Analisis pengolahan data keuangan oleh aplikasi SIMDA Keuangan.
- b. Analisis pengendalian internal aplikasi SIMDA Keuangan dalam pengolahan data keuangan.

Analisis karakteristik kualitas laporan keuangan hasil keluaran (*output*) SIMDA Keuangan.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Aplikasi SIMDA Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo

Aplikasi SIMDA Keuangan adalah salah satu aplikasi dalam Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah yang dikembangkan oleh BPKP khususnya dalam fungsi pengelolaan keuangan daerah mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan. Tahapan pengelolaan keuangan yang dicakup oleh SIMDA Keuangan meliputi proses penganggaran, penatausahaan keuangan. Untuk mampu bekerja sesuai dengan fungsinya, maka aplikasi SIMDA Keuangan memerlukan 3 komponen utama. Yaitu *Hardware*, *Software*, dan *Brainware*. Adapun penjelasan masing-masing komponen tersebut dijelaskan antara lain :

a. Hardware

Merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan aplikasi SIMDA Keuangan melalui perangkat keras komputer dan media perangkat keras pendukung lainnya seperti jaringan komunikasi, printer dll.

b. Software

Software atau perangkat lunak adalah komponen dari suatu aplikasi komputer yang mengolah data sesuai dengan fungsi dan perintah yang diberikan pada Software/aplikasi tersebut. Software yang dimaksud dalam pengolahan data keuangan melalui aplikasi SIMDA Keuangan adalah aplikasi SIMDA Keuangan versi 2.13

c. Brainware

Brainware adalah orang-orang yang dipekerjakan dan memiliki keahlian untuk mengoperasikan komputer. Para tenaga ahli yang bekerja untuk mengoperasikan komputer biasanya terdiri dari : *Operator*, *Programmer* dan *Admin*.

4.2 Data Keuangan Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo

Data keuangan merupakan salah satu unsur penting dalam pengolahan data keuangan. Data keuangan digunakan sebagai input yang akan diolah kedalam sebuah sistem pengolahan data. Data keuangan dalam hubungannya dengan pengolahan data keuangan dengan aplikasi SIMDA Keuangan adalah dokumen resmi yang digunakan untuk penatausahaan seperti Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP),

Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Bukti Penerimaan dan Surat Tanda Setoran (STS).

4.3 Implementasi SIMDA Keuangan Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo

Tahap awal dalam penerapan SIMDA Keuangan hal yang perlu di persiapkan antara lain dengan mempersiapkan komputer server sebagai penampung data keuangan dan sebagai pusat kegiatan, setelah itu membuat jaringan komputer sebagai penghubung untuk alat kerja staf keuangan, jaringan kabel dan wireless kemudian menginstalasinya pada komputer yang telah dipersiapkan setelah itu dilakukan pelatihan terhadap pengelola keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan data keuangan daerah.

4.4 Penganggaran

Penganggaran melalui aplikasi SIMDA Keuangan merupakan tahap awal dalam pengolahan data keuangan berbasis pengolahan data elektronik. Prosedur anggaran membentuk suatu *database* anggaran kinerja/program/kegiatan OPD atau Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selama satu tahun. Proses penganggaran

dalam aplikasi SIMDA Keuangan meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran, penyusunan Anggaran Kas, penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan Anggaran.

4.5 Kualitas informasi/ hasil keluaran (Laporan Keuangan) SIMDA Keuangan

Kualitas suatu informasi merupakan suatu aspek terpenting dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Suatu laporan yang kurang berkualitas akan berpengaruh pada buruknya suatu keputusan yang diambil. Kualitas informasi laporan keuangan dapat dinilai dari berbagai aspek. Dalam penelitian ini kualitas informasi laporan keuangan dinilai berdasarkan aspek karakteristik kualitatif. Kualitas informasi dinilai melalui persepsi terhadap kualitas informasi aplikasi SIMDA Keuangan yang dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan pengguna laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo. Pengguna laporan keuangan yang dimaksud antara lain Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran, Kepala Bidang selaku kuasa pengguna anggaran, PPTK, dan Staf keuangan. Jumlah responden

yang ada untuk diwawancarai adalah sepuluh orang terdiri dari 1 orang Pengguna Anggaran, 1 orang Kuasa Pengguna Anggaran, 2 orang PPTK, dan 6 Staff Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo. Kualitas informasi dinilai dari kriteria Relevan, Akurat, dan Tepat Waktu.

4.5.1 Implementasi SIMDA Keuangan

pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo

Aplikasi SIMDA Keuangan merupakan aplikasi pengolah data keuangan yang digunakan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan tugas pengelolaan keuangan daerah melalui fungsi penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan. Penerapan aplikasi SIMDA Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara umum dinilai sudah baik, seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa penerapan SIMDA Keuangan telah didukung dengan komponen-komponen dengan cukup baik berdasarkan unsur SIMDA menurut BPKP. Komponen-komponen tersebut meliputi Akses, Portal Pelayanan Publik, Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi serta Infrastruktur dan aplikasi dasar semua sarana seperti *hardware*, *Software* dan *Brainware*.

a. Akses jaringan internet.

Akses jaringan internet yang digunakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo menggunakan jaringan kabel dan *wireless*. Akses jaringan internet ini hanya terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Akses jaringan internet ini hanya untuk jaringan dalam lingkungan intern kantor yang menghubungkan komputer server dengan komputer client. Selain itu dikarenakan SIMDA Keuangan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan terpusat disana, akan tetapi sekarang ini proses penginputannya sudah bisa dilaksanakan dimasing-masing OPD atau Satuan Kerja karena penggunaan akses jaringan ini sudah cukup baik.

b. Portal, pelayanan publik

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bungo belum menggunakan portal pelayanan publik. Hal ini dikarenakan keterbatasan jaringan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bungo. Pemerintah Kabupaten Bungo hanya menggunakan jaringan online dengan menggunakan kabel dan *wireless* saja.

c. Organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi pendukung. SIMDA Keuangan dikembangkan oleh BPKP yang bekerja

sama dengan Pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan data keuangan daerah. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana ini berupa *Hardware*, *Software* dan *Brainware* dengan penjelasan sebagai berikut :

1. *Hardware* atau perangkat keras dalam mendukung pengolahan data keuangan melalui aplikasi SIMDA Keuangan telah memenuhi spesifikasi minimum yang baik.
2. Fungsi dan menu-menu yang dimiliki aplikasi SIMDA Keuangan sebagai *Software* pengolah data keuangan juga sangatlah memadai. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengolahan data keuangan pemerintah daerah setidaknya mencakup fungsi penganggaran, fungsi penatausahaan, dan fungsi pembukuan atau fungsi akuntansi. Sementara itu fungsi-fungsi dalam Permendagri tersebut telah disajikan dalam menu aplikasi SIMDA Keuangan.
3. *Brainware* sebagai pengguna aplikasi SIMDA Keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah seperti operator dan admin juga merupakan tenaga ahli yang sangat berkompeten dalam pengolahan data keuangan melalui

aplikasi SIMDA Keuangan, keterampilan mereka tersebut sudah memadai dengan jenis pekerjaan masing-masing personil, kedepannya diharapkan dengan pelatihan yang memadai dapat menambah pengetahuan dan memahami logika akuntansi serta menguasai komputerisasi secara baik.

4.5.2 Analisis Hasil Keluaran SIMDA

Keuangan Pada Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bungo

Untuk dapat menganalisa hasil pengukuran kualitas informasi laporan keuangan dari wawancara yang telah dilakukan peneliti adalah dengan menghitung persentase tingkat keberhasilan dengan menggunakan rumus Distribusi Frekuensi Relatif.

Rumus : Tingkat keberhasilan

$$= \frac{\text{jumlah frekuensi}}{\text{jumlah seluruh frekuensi}}$$

untuk mendapatkan kesimpulan dari proses analisa selanjutnya dengan menggunakan tabel interpretasi hasil sebagai berikut :

Tabel I. Interpretasi

Skala (%)	Interpretasi
0 – 25	Tidak Baik
26 – 50	Cukup Baik
51 – 75	Baik
76 – 100	Sangat Baik

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan hasil pengukuran persentase kualitas informasi Laporan Keuangan sebelum dan sesudah penerapan SIMDA Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo. Berikut ini akan disajikan tabel skala interpretasi dalam pengukuran kualitas informasi laporan keuangan:

Tabel 3. Interpretasi

Skala (%)	Interpretasi
0 – 25	Tidak Baik
26 – 50	Cukup Baik
51 – 75	Baik
76 – 100	Sangat Baik

Untuk mengetahui kualitas informasi Laporan Keuangan sebelum dan sesudah penerapan SIMDA Keuangan dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut

Setelah Penerapan SIMDA Keuangan

(Dengan Jawaban Iya)

$$\text{Tingkat keberhasilan} = \frac{\text{jumlah frekuensi}}{\text{jumlah seluruh frekuensi}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat keberhasilan} = \frac{40}{40} \times 100\% = 100\%$$

Sebelum Penerapan SIMDA Keuangan

(Dengan Jawaban Iya)

$$\text{Tingkat keberhasilan} = \frac{\frac{\text{jumlah frekuensi}}{\text{jumlah seluruh frekuensi}}}{40} \times 100\% = 5\%$$

Dari hasil diatas diketahui bahwa penilaian yang menjawab setuju pada wawancara setelah penerapan SIMDA Keuangan lebih besar (**100%**) dibandingkan dengan penilaian sebelum penerapan SIMDA Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo. Dengan ini kualitas laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo telah memenuhi kriteria relevan dengan penilaian sangat baik. Hal ini berarti informasi yang dihasilkan oleh aplikasi SIMDA Keuangan lebih berkualitas untuk mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen. Kualitas pengambilan keputusan yang dapat diambil dengan menggunakan laporan keuangan yang dihasilkan aplikasi SIMDA Keuangan meningkat dikarenakan aplikasi SIMDA Keuangan mampu menghasilkan laporan keuangan dan segala bukti pendukung yang lebih lengkap dan cepat bila dibandingkan dengan proses manual.

Laporan tersebut juga sangat sesuai dengan kebutuhan untuk memantau posisi keuangan dan kinerja yang telah dicapai misalkan saja pemantauan jumlah sisa SPD yang dapat digunakan oleh PPTK dalam melaksanakan sebuah kegiatan atau program.

a. Akurat

Tabel 4. Pertanyaan Kualitas Laporan Keuangan

No	Pertanyaan	Setelah SIMDA		Sebelum SIMDA	
		Iya	Tidak	Iya	Tidak
1	Pengolahan data dapat melakukan prosedur akuntansi dengan benar dan cermat	9			10
2	Data dapat diubah bila terjadi kesalahan	10		4	6
3	Pengolahan data transaksi menjadi laporan keuangan dapat dilakukan dengan benar	10		1	9
4	Informasi	10			10

	yang dihasilkan dapat dipercaya				
	Jumlah	39		5	25

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel wawancara diatas, berikut penyajian pengukuran keakuratan kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo sebelum dan sesudah penerapan SIMDA Keuangan sebagai aplikasi pengolahan data.

Tabel 5. Interpretasi

Skala (%)	Interprestasi
0 – 25	Tidak Baik
26 – 50	Cukup Baik
51 – 75	Baik
76 – 100	Sangat Baik

Untuk mengetahui keakuratan Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo sebelum dan sesudah penerapan SIMDA Keuangan sebagai berikut:

Setelah Penerapan SIMDA Keuangan (Dengan Jawaban Iya)

$$\text{Tingkat keberhasilan} = \frac{\text{jumlah frekuensi}}{\text{jumlah seluruh frekuensi}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat keberhasilan} = \frac{39}{40} \times 100\% = 97,5\%$$

Sebelum Penerapan SIMDA Keuangan**(Dengan Jawaban Iya)**

$$\text{Tingkat keberhasilan} = \frac{\text{jumlah frekuensi}}{\text{jumlah seluruh frekuensi}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat keberhasilan} = \frac{5}{40} \times 100\% = 12,5\%$$

Dari penilaian diatas kualitas laporan keuangan setelah penerapan aplikasi SIMDA Keuangan dengan kriteria akurat menunjukkan hasil **97,5%** yang berarti kualitas laporan keuangan yang dihasilkan aplikasi SIMDA Keuangan ini sangat baik. Hal ini menunjukan bahwa aplikasi SIMDA Keuangan mampu menghasilkan informasi dengan ketepatan atau tingkat kebenaran yang lebih baik dibandingkan dengan pengolahan data manual. Faktor *human eror* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesalahan penyusunan laporan keuangan dengan prosedur manual. Proses penyusunan laporan secara otomatis yang dilakukan oleh aplikasi SIMDA Keuangan saat melakukan input data, membuat bendahara tidak perlu lagi membuat atau menyusun laporan keuangan karena proses tersebut telah dilakukan oleh logika komputer yang mengerjakanya secara otomatis.

b. Ketepatan Waktu**Tabel 6. Interpretasi Kualitas Laporan****Keuangan**

No	Pertanyaan	Setelah SIMDA		Sebelum SIMDA	
		Iya	Tidak	Iya	Tidak
1	Sistem dapat menghasilkan laporan triwulanan, bulanan, dan tahunan saat dibutuhkan?	10			10
2	Informasi dapat diperoleh saat dibutuhkan?	10			10
3	Penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan?	10			10
Jumlah		30			30

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel wawancara diatas, berikut disajikan tabel skala interpretasi dalam pengukuran kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo:

Tabel 7. Interpretasi

Skala (%)	Interpretasi
0 – 25	Tidak Baik
26 – 50	Cukup Baik
51 – 75	Baik
76 – 100	Sangat Baik

Berikut untuk mengetahui ketepatan waktu laporan keuangan yang disajikan sesudah atau pun sebelum penerapan SIMDA Keuangan:

Setelah Penerapan SIMDA Keuangan (Dengan Jawaban Iya)

$$\text{Tingkat keberhasilan} = \frac{\text{jumlah frekuensi}}{\text{jumlah seluruh frekuensi}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat keberhasilan} = \frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$$

Sebelum Penerapan SIMDA Keuangan (Dengan Jawaban Iya)

$$\text{Tingkat keberhasilan} = \frac{\text{jumlah frekuensi}}{\text{jumlah seluruh frekuensi}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat keberhasilan} = \frac{0}{30} \times 100\% = 0$$

Berdasarkan hasil penilaian kualitas laporan keuangan menunjukkan hasil **100%** yang berarti penerapan SIMDA Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo dengan kriteria Ketepatan Waktu sangat lah baik. Hal ini menunjukan bahwa aplikasi SIMDA Keuangan mampu menghasilkan laporan keuangan dengan lebih cepat bila diban-

dingkan dengan pengolahan manual. Peningkatan kecepatan pengolahan data dan penyajian data ini dikarenakan SIMDA Keuangan merupakan aplikasi komputer yang menggunakan logika komputer, sehingga proses penyusunan laporan keuangan tidak perlu lagi melalui proses pengulangan input angka-angka atau pemindahan dari satu buku ke buku lain. Proses ini akan secara otomatis dikerjakan oleh logika pemrograman bahasa komputer saat pertama kali input data keuangan.

Berdasarkan ketiga tabel interpretasi dari penilaian diatas dapat disimpulkan bahwa Penerapan SIMDA Keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo untuk mendukung proses pengolahan data keuangan menjadi laporan keuangan merupakan langkah yang sangat baik. Manfaat yang diberikan dari penerapan sistem ini sangat banyak sekali dari kecepatan pengolahan data, keakuratan laporan keuangan hingga relevansi informasi yang dihasilkan laporan tersebut. Kualitas laporan keuangan yang di hasilkan oleh Aplikasi SIMDA Keuangan dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan keuangan lebih akurat dibandingkan

dengan penyusunan Laporan Keuangan secara manual.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian diatas, maka saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan kedepan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Bungo perlu menambahkan akses jaringan *Wifi yang lebih luas* di lingkup Kabupaten Bungo agar proses penginputan data yang dilakukan di instansi ataupun OPD masing-masing, tidak mengalami gangguan, Sehingga pengiputan dapat diselesaikan dengan cepat, walaupun terpusat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Selain itu menempatkan personil yang benar-benar memahami bidang akuntansi dan mampu mengoperasional program aplikasi SIMDA ini. Hal ini akan membantu dalam menyajikan Laporan Keuangan dengan lebih baik.
2. Untuk pengguna SIMDA Keuangan (operator), khususnya yang di OPD atau Satuan Kerja, hendaknya lebih meningkatkan pemahaman terhadap peraturan keuangan daerah serta sistem informasi yang digunakan pemerintah daerah dalam pengolahan data keuangan melalui

pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis terhadap Sumber Daya Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan, 2011. *Modul Bimbingan Teknis Administrator System Requirement SIMDA Keuangan Versi 2.1*, Jakarta : Satuan Tugas Pengembangan SIMDA.
- . Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah*.
- . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- . Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- . Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Niftahusaadah, Nunung N. 2010. *Persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Terhadap Pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan : Studi Pada Pemerintah Kota Bandung*. Tesis: Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.

Nugraha Harmadhani Adi, 2012. *Analisis Penerapan Sistem Informadi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah*. Tesis: Universitas Negeri Malang.

Pemerintah Reuplik Indonesia.2004.*Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Edisi Empat.Erlangga ,Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia.2004.Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.Jakarta.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*: Selemba Empat, Jakarta.

Yuliani Safrida, 2010. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal: Universitas Syah Kuala.

Sugiyono.2012."*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung